SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 7 **Seri : D**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban terhadap penggunaan pakaian dinas dan untuk menunjukkan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara maka perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin

Kecamatan;

8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung;
11. Pakaian Dinas Harian perangkat daerah tertentu adalah pakain dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu;
12. Pakain Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakain dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara;
13. Pakain Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakain dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satyalancana karya satya;
14. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah pakain dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya;
15. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakain seragam yang dipakai pada tanggal dan / atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Nama lokasi adalah penyebutan nama lokasi Organisasi Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan;
18. Tanda pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, Nomor Induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari

pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu;

19. Papan nama pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai;
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atribut lainnya;

Pasal 2

(1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
   a. PDH, terdiri dari :
      1) PDH warna khaki;
      2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
      3) PDH batik atau pakaian khas Daerah.
   b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
   c. PSL;
   d. PDL;
   e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
   f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
   g. PDU Camat dan Lurah; dan
   h. Pakaian Seragam Batik KORPRI.

(2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model tercantum dlam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SALINAN

Bagian Kedua
PDH Warna Khaki

Pasal 4

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari atas :
   a. PDH warna khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
   b. PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada hari Senin dan Selasa.

(3) Penggunaan PDH warna khaki kemeja lengan pendek bagi Aparatur Sipil Negara pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

(4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
PDH Kemeja Putih

Pasal 5

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :
   a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
   b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

(3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi Aparatur Sipil Negara pria dimasukkan ke dalam celana.

(4) PDH kemeja putih dan celana/rok berwarna hitam digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada hari Rabu.

(5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
PDH Batik atau Pakaian Khas Daerah

Pasal 6

(1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada hari Kamis, hari Jumat dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Bagian Kelima
PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 7

(1) PDH untuk Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan Hari Ulang Tahun.
(2) Penggunaan PDH untuk Perangkat Daerah tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam
PSL

Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan pada :
    a. acara kenegaraan;
    b. acara resmi;
    c. perjalanan dinas ke luar negeri;
    d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
    e. Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
    f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PSL untuk Aparatur Sipil Negara pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3) PSL untuk Aparatur Sipil Negara wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4) Jenis dan model serta spesifikasi PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketujuh
PDL

Pasal 9

(1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedelapan
PDU

Pasal 11

(1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
(3) Jenis dan model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 12

(1) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan untuk Aparatur Sipil Negara pada saat :
    a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
    b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
    c. upacara hari besar nasional; dan
    d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

SALINAN

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 13

Jenis Atribut Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara terdiri atas :
a. tanda jabatan;
b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
c. Papan Nama Pegawai;
d. nama Kementerian;
e. nama Pemerintah Daerah;
f. lambang Pemerintah Daerah; dan
g. Tanda Pengenal.

Pasal 14

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. tanda jabatan bahu;
    b. tanda jabatan kerah; dan
    c. tanda jabatan saku.
(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik KORPRI dan PDL.
(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 16

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa :
    a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi Sekretaris Daerah;
    b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;

c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berupa :
a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa :
a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 17

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto Aparatur Sipil Negara pada Tanda Pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara.
(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH warna khaki.
(4) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
b. biru untuk pejabat administrator;
c. hijau untuk pejabat pengawas;
d. jingga untuk pejabat pelaksana; dan
e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
a. tutup kepala;
b. ikat pinggang; dan
c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 19

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari :
a. peci nasional;
b. Mutz; dan
c. topi pet.

(2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SALINAN

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 22

(1) Aparatur Sipil Negara wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
(2) Pakaian dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan pakaian dinas tesendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
b. Berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok

Pasal 24

(1) Aparatur Sipil Negara yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 23 dikenakan sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN

n

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Di tetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA
Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

KRISTOF BOHALIMA, SH.,M.A
NIP. 19871221 201001 1 007

SALINAN

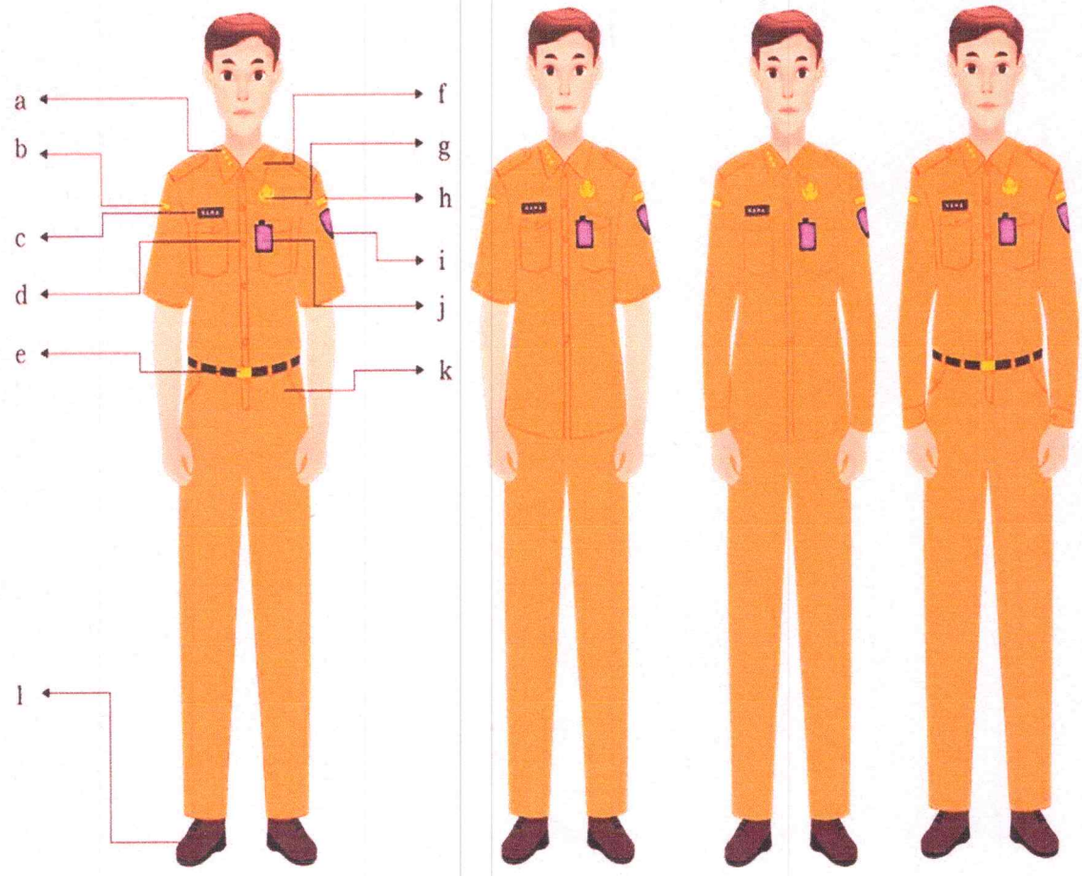
n

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi pakaian dinas harian warna khaki

1. Pakaian dinas harian warna khaki pria

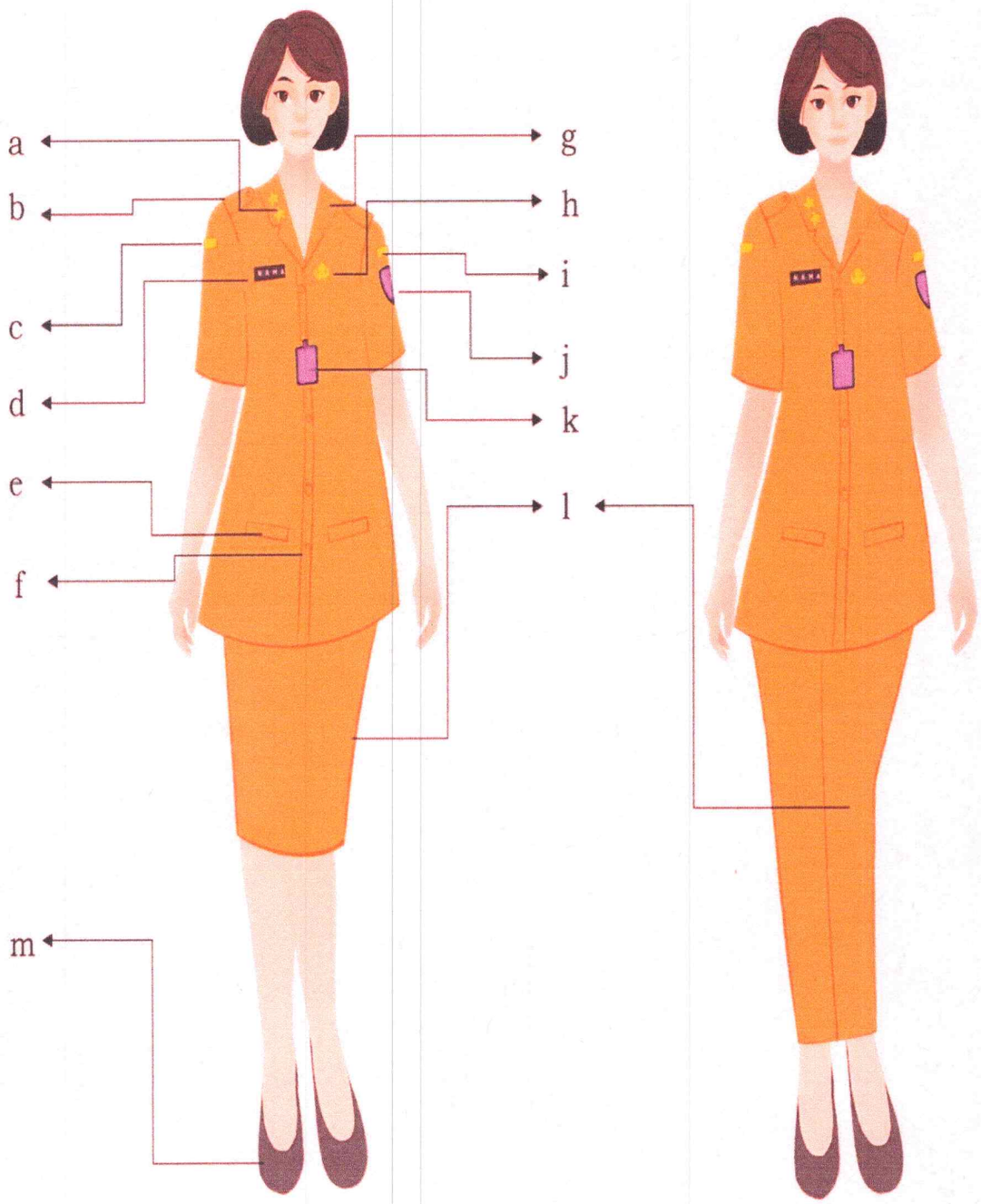


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. kancing
e. ikat pinggang
f. kerah

n

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama daerah
i. lambang daerah
j. tanda pengenal
k. saku celana depan
l. sepatu hitam

2. Pakaian dinas harian warna khaki wanita

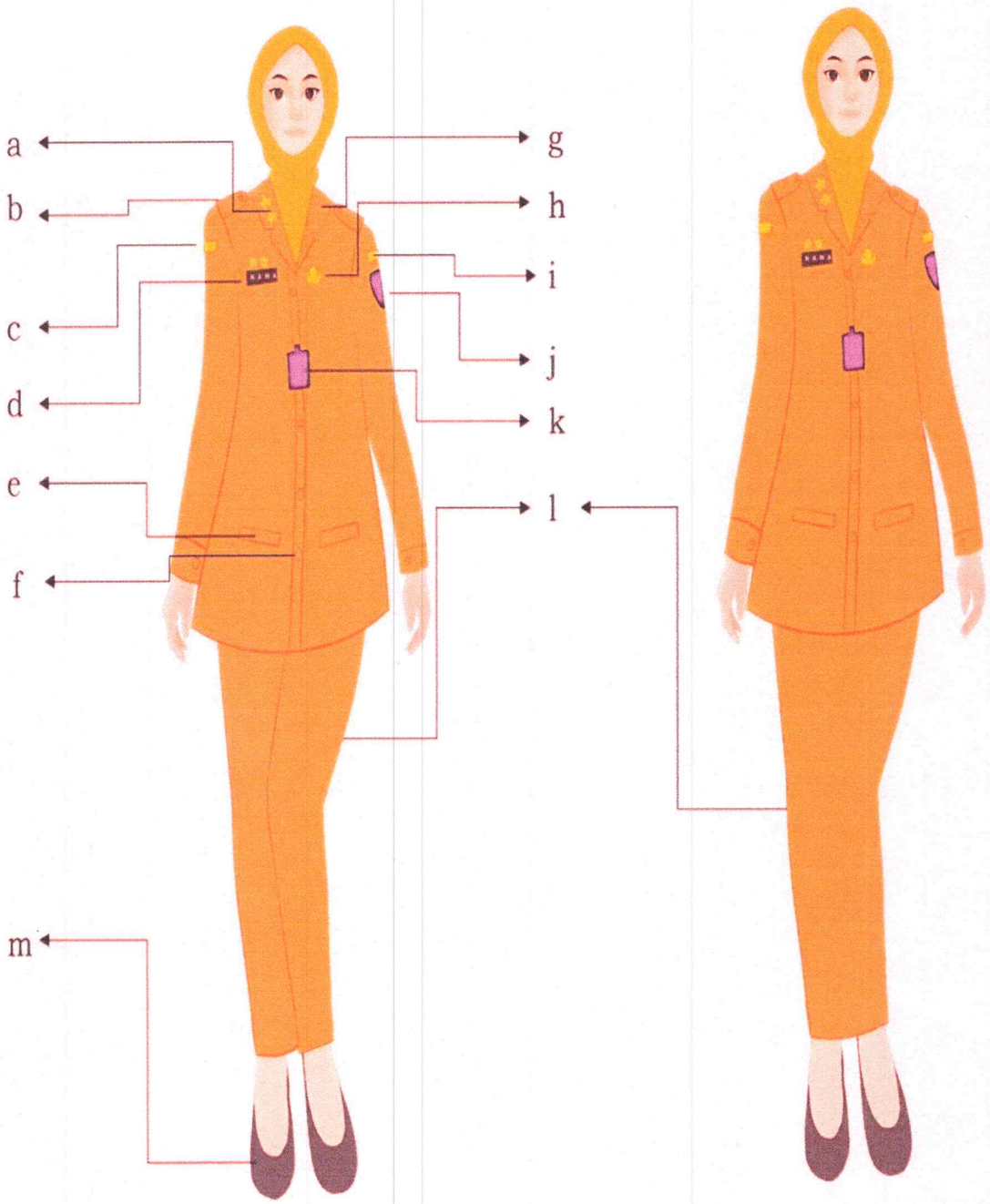


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

n

i. nama Daerah
j. lambang Daera
k. tanda pengenal
l. rok/ celana Panjang
m. sepatu hitam

3. Pakaian dinas harian warna khaki wanita berjilbab

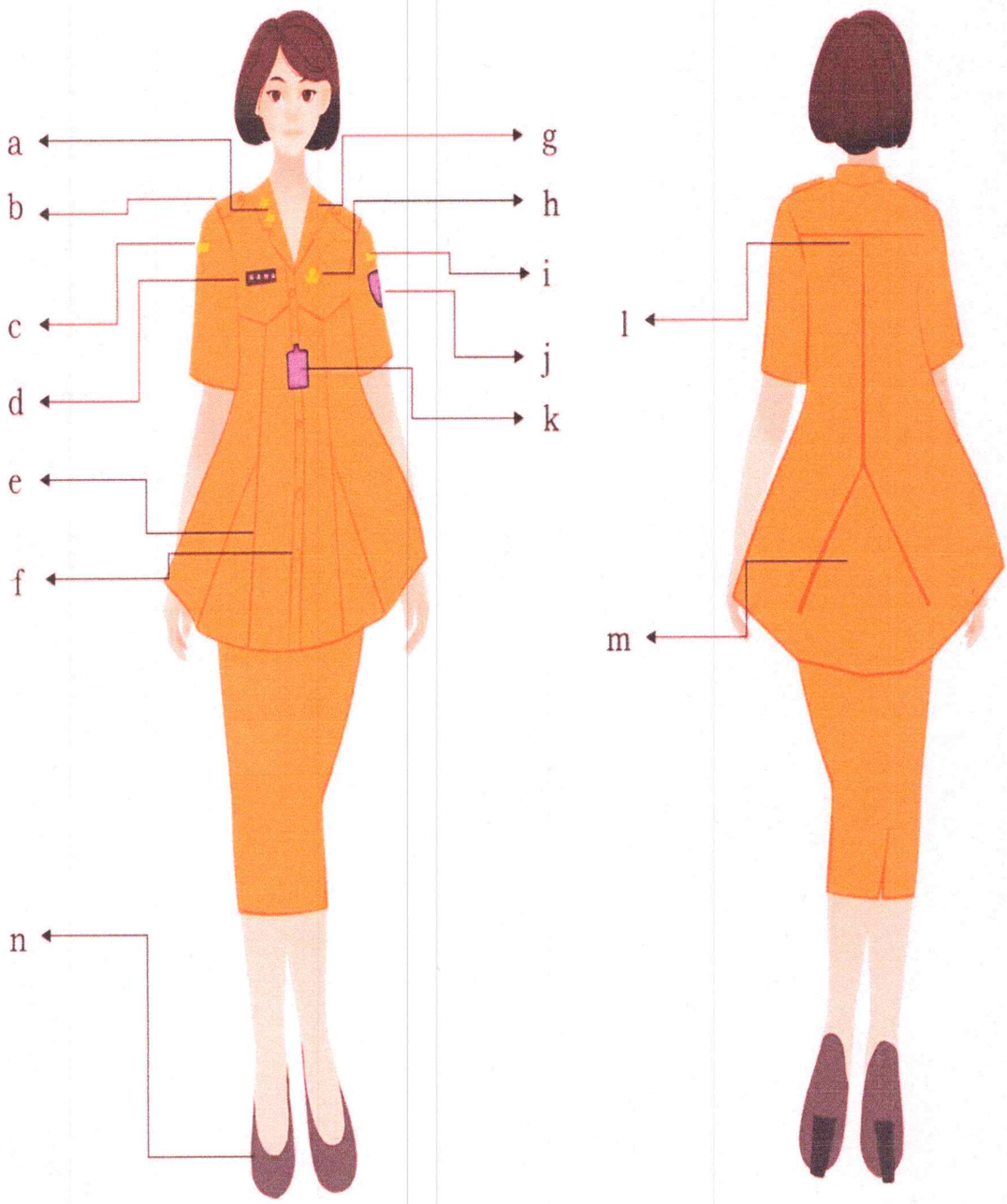


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

n

i. nama Daerah
j. lambang Daerah
k. tanda pengenal
l. celana panjang/ rok Panjang
m. sepatu hitam

4. Pakaian dinas harian warna khaki wanita hamil

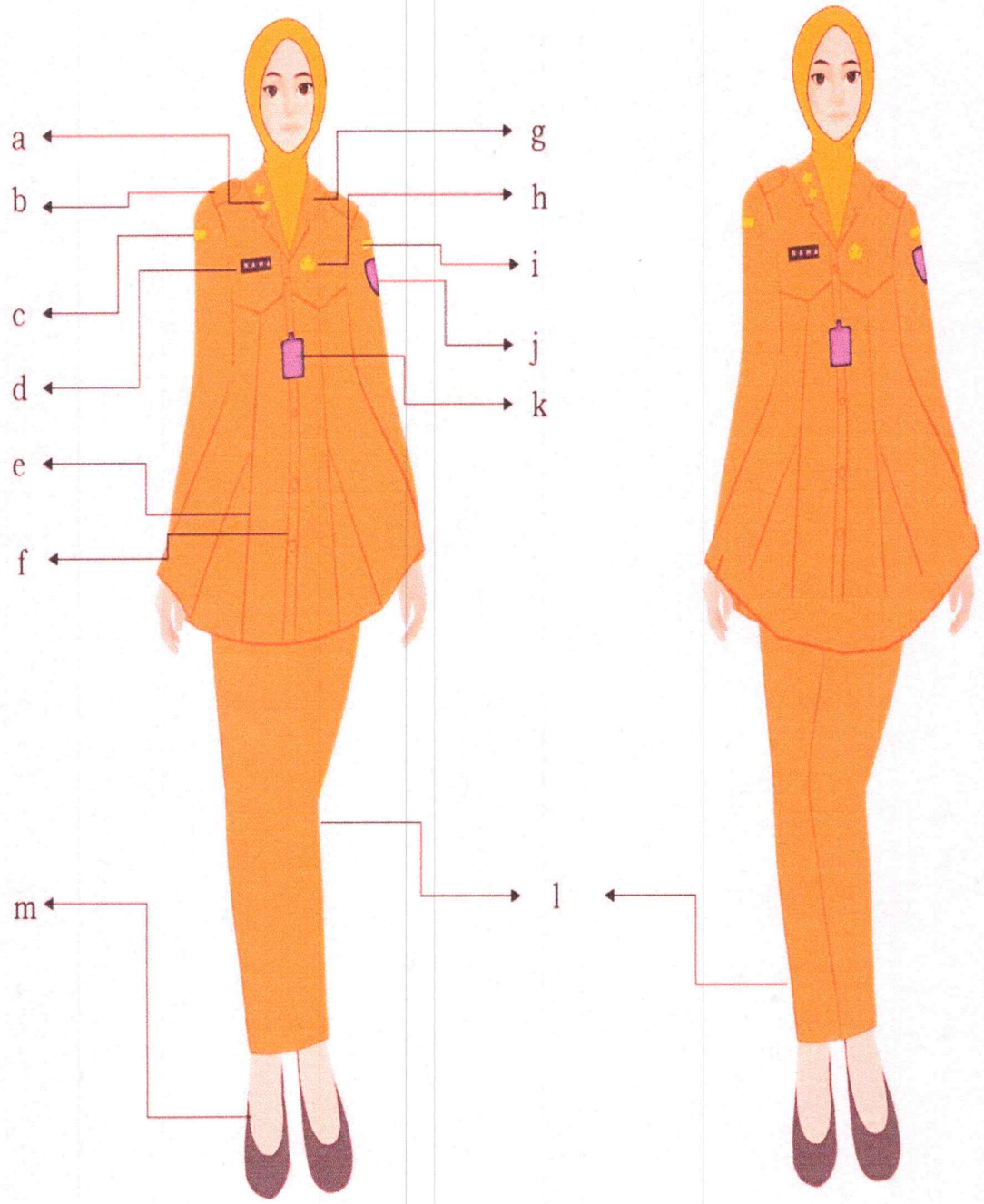


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

n

i. nama Daerah
j. lambang Daerah
k. tanda pengenal
l. sambung bahu belakang
m. sambung baju belakang
n. sepatu hitam

5. Pakaian dinas harian warna khaki wanita hamil berjilbab



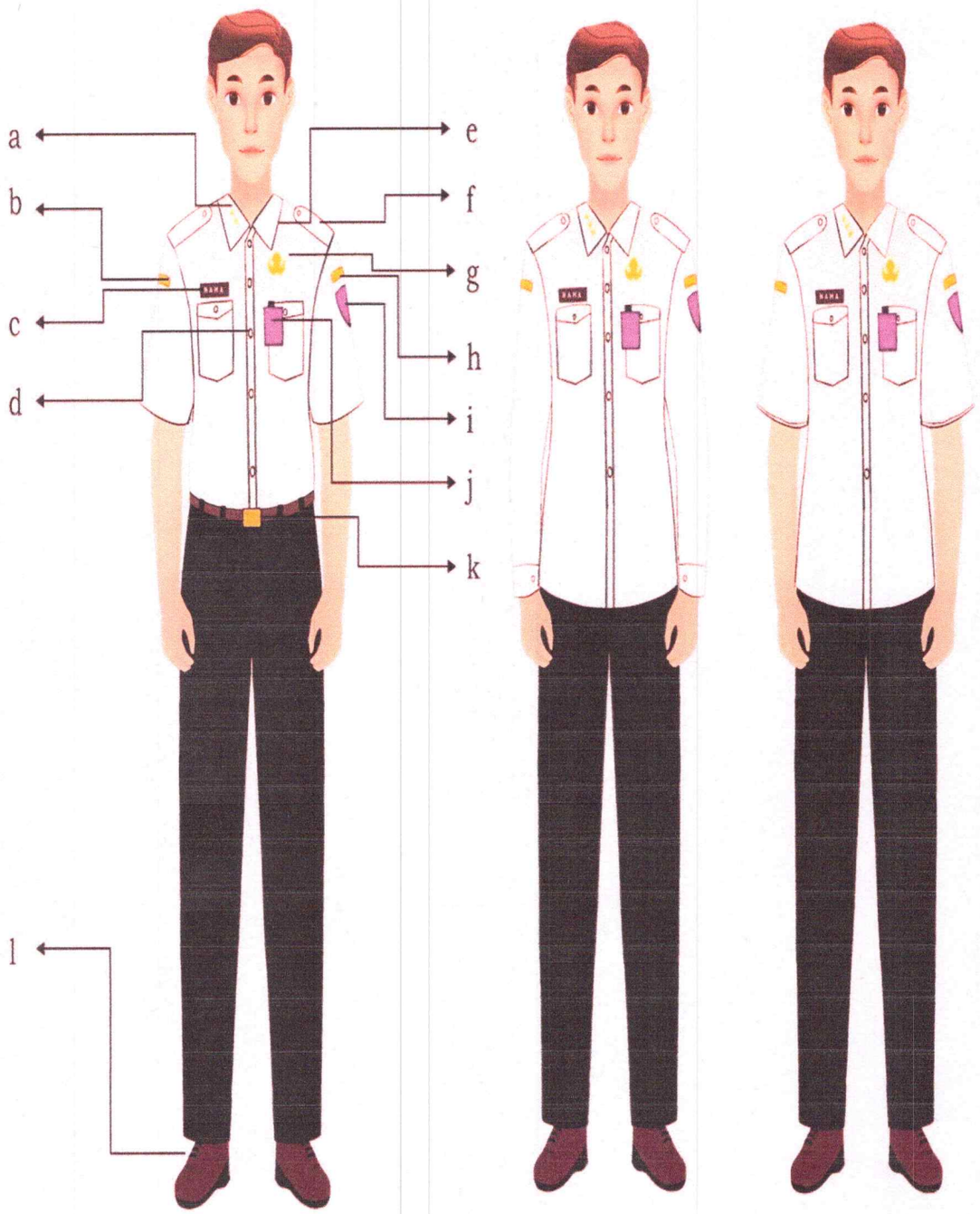
Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

n

i. nama Daerah
j. lambang Daerah
k. tanda pengenal
l. rok panjang/ celana Panjang
m. sepatu hitam

B. Jenis, model, dan spesifikasi pakaian dinas harian kemeja putih

1. Pakaian dinas harian kemeja putih pria



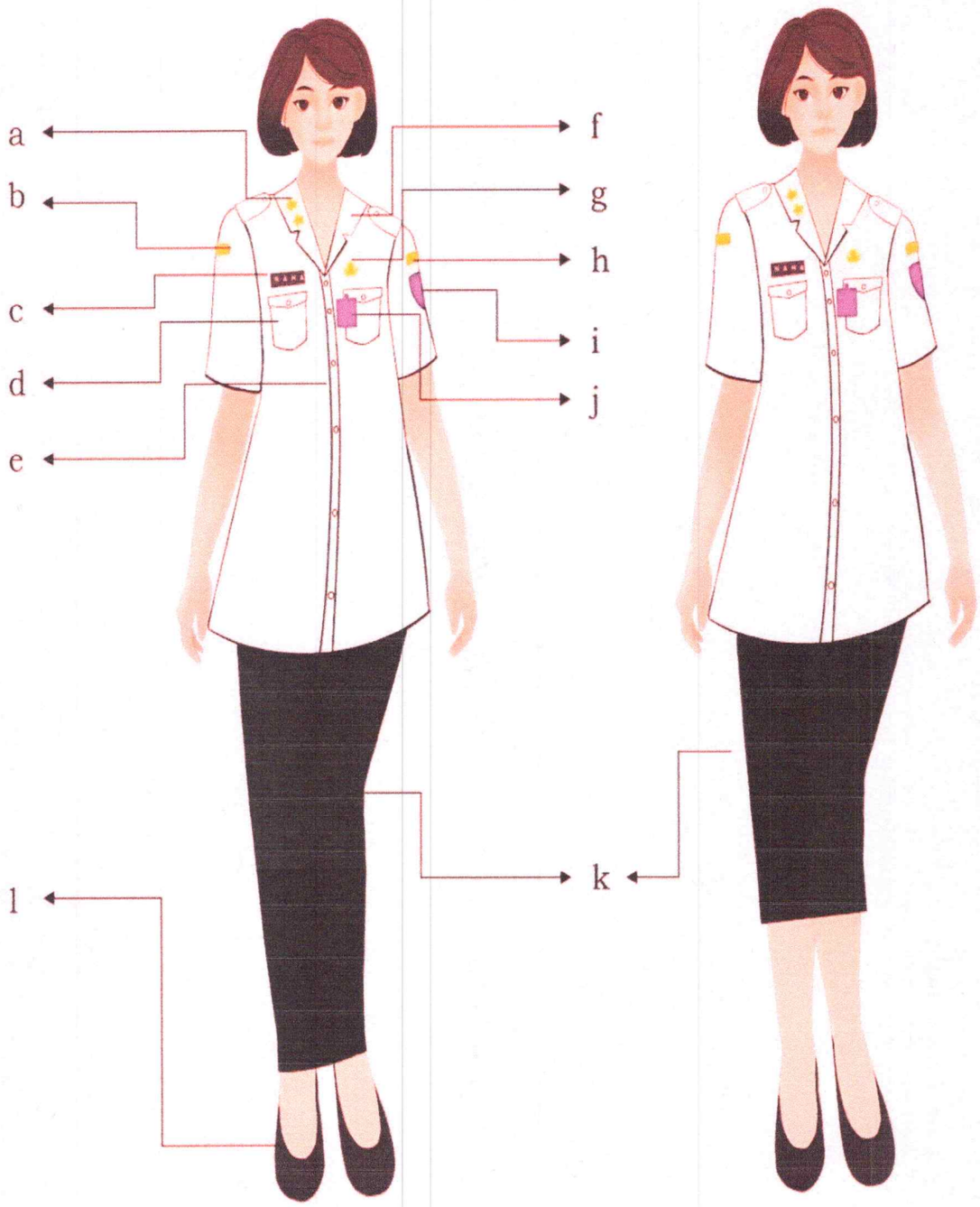
Keterangan :

a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. kancing
e. kerah
f. lidah bahu
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

n

h. nama Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. ikat pinggang
l. sepatu hitam

2. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita

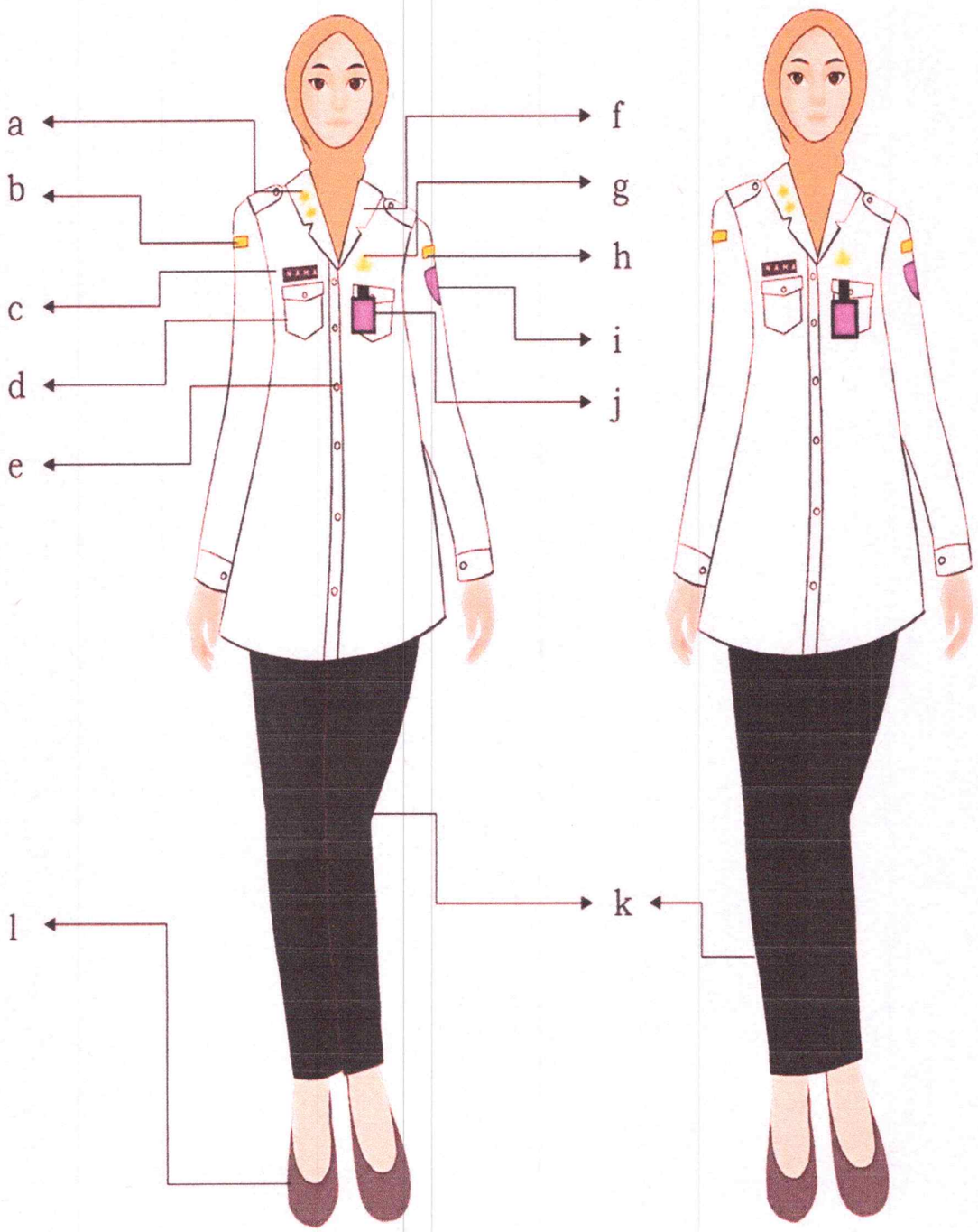


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

n

h. nama Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/ rok
l. sepatu hitam

3. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita berjilbab

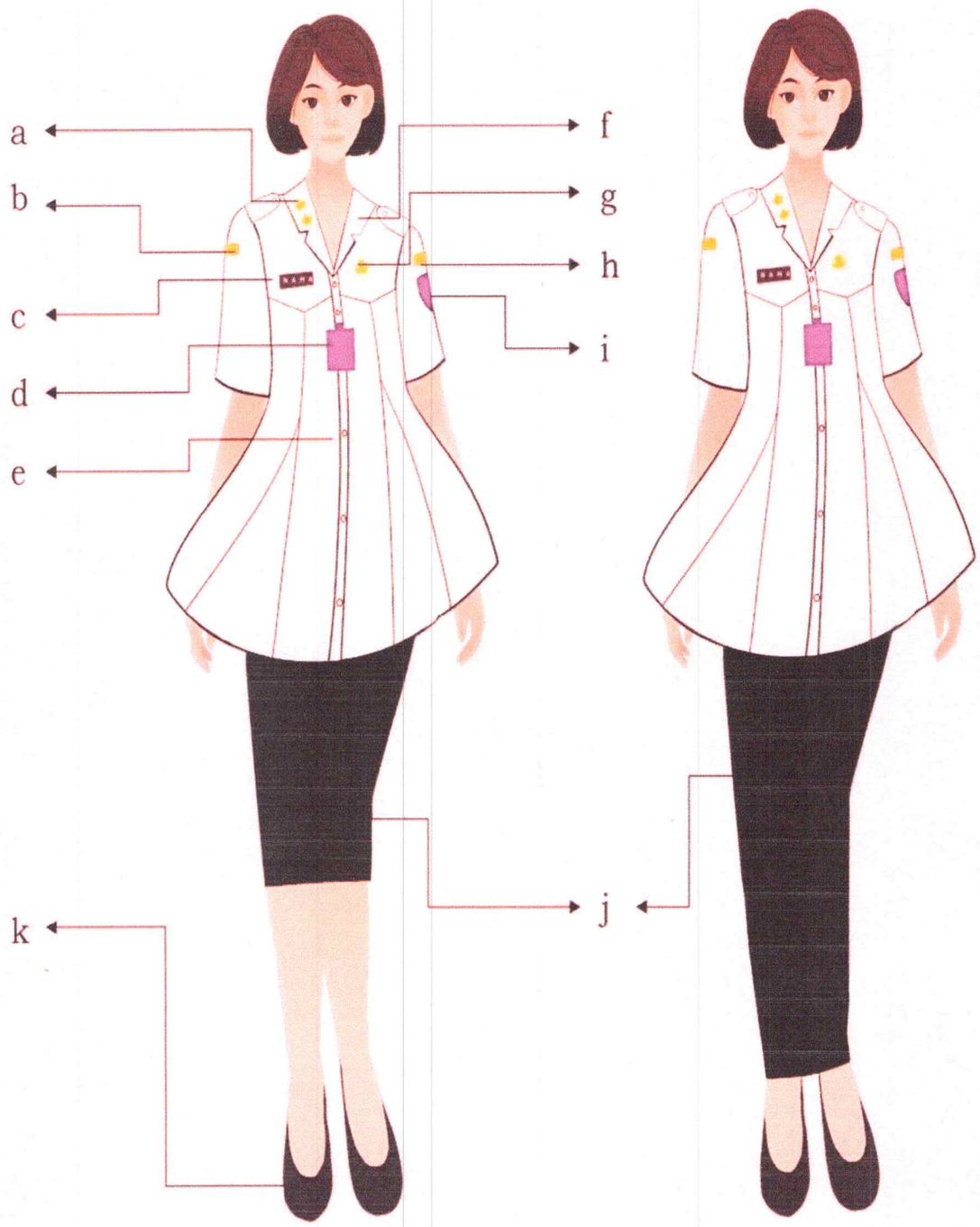


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah

n

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/ rok panjang
l. sepatu hitam

4. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita hamil

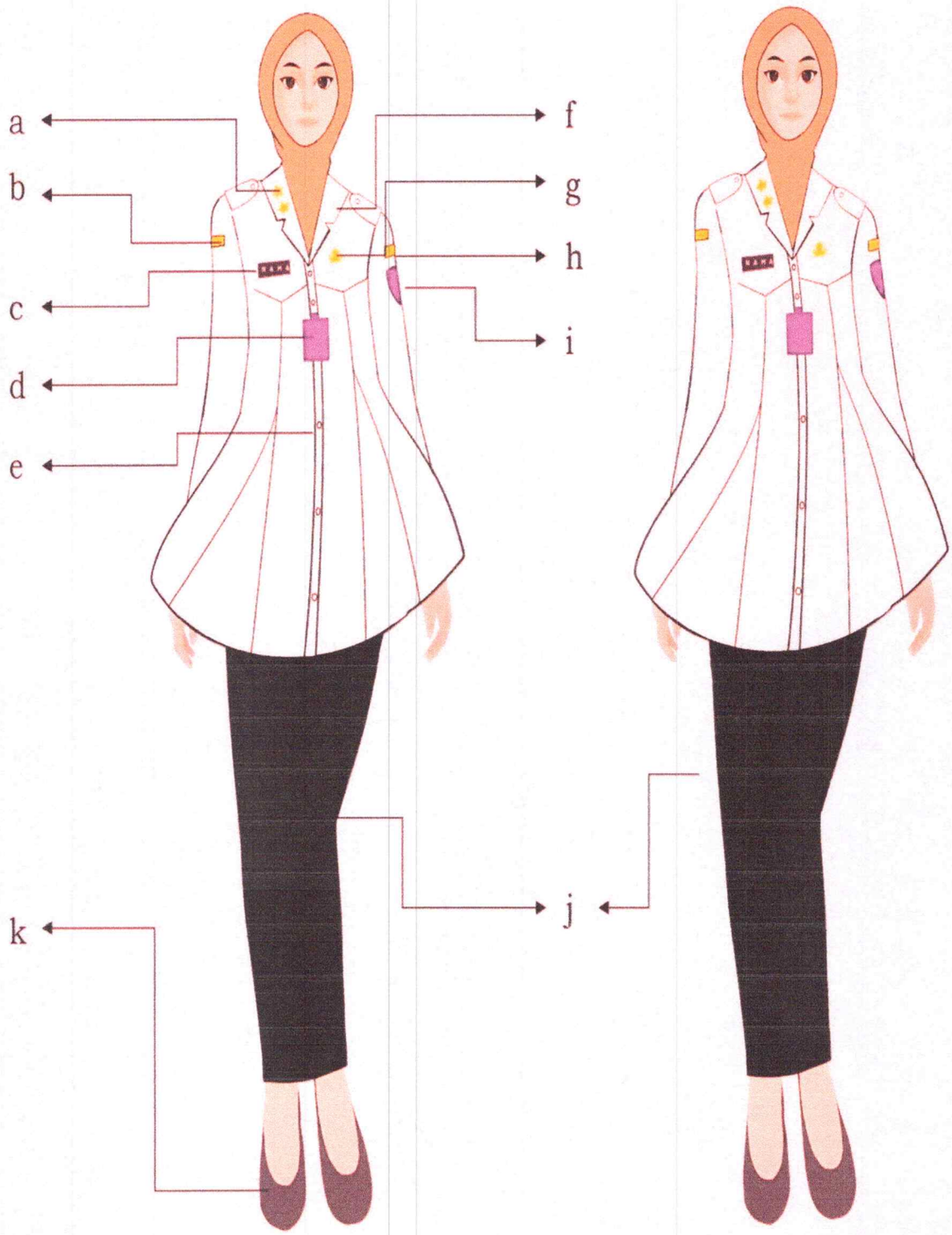


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah

n

g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Daerah
i. lambang Daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/ rok
l. sepatu hitam

5. Pakaian dinas harian kemeja putih wanita hamil berjilbab



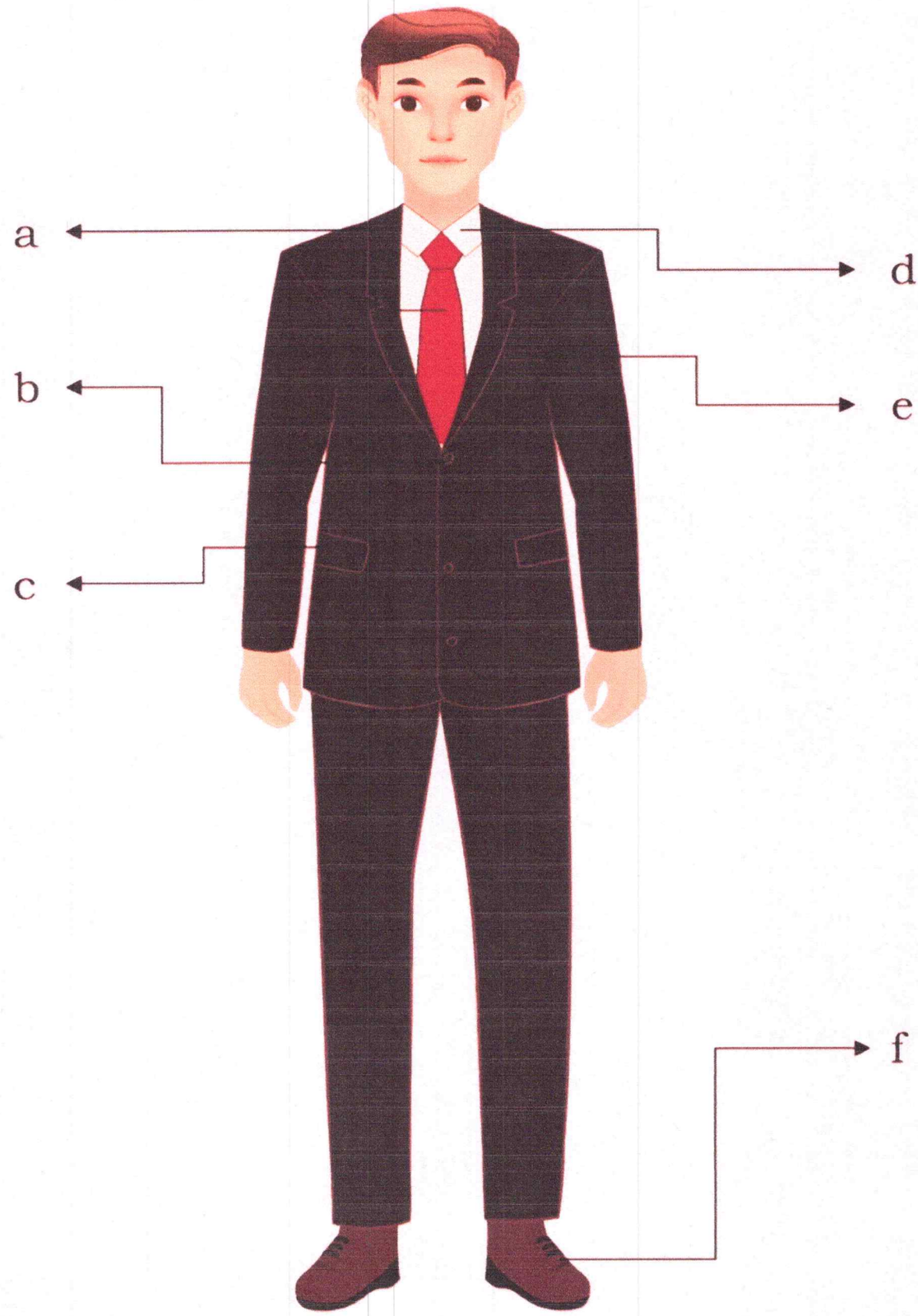
Kerangan :
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing

n

f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Daerah
i. lambang Daerah
j. celana panjang/ rok panjang
k. sepatu hitam

C. Jenis dan model pakaian sipil lengkap

1. Pakaian sipil lengkap pria

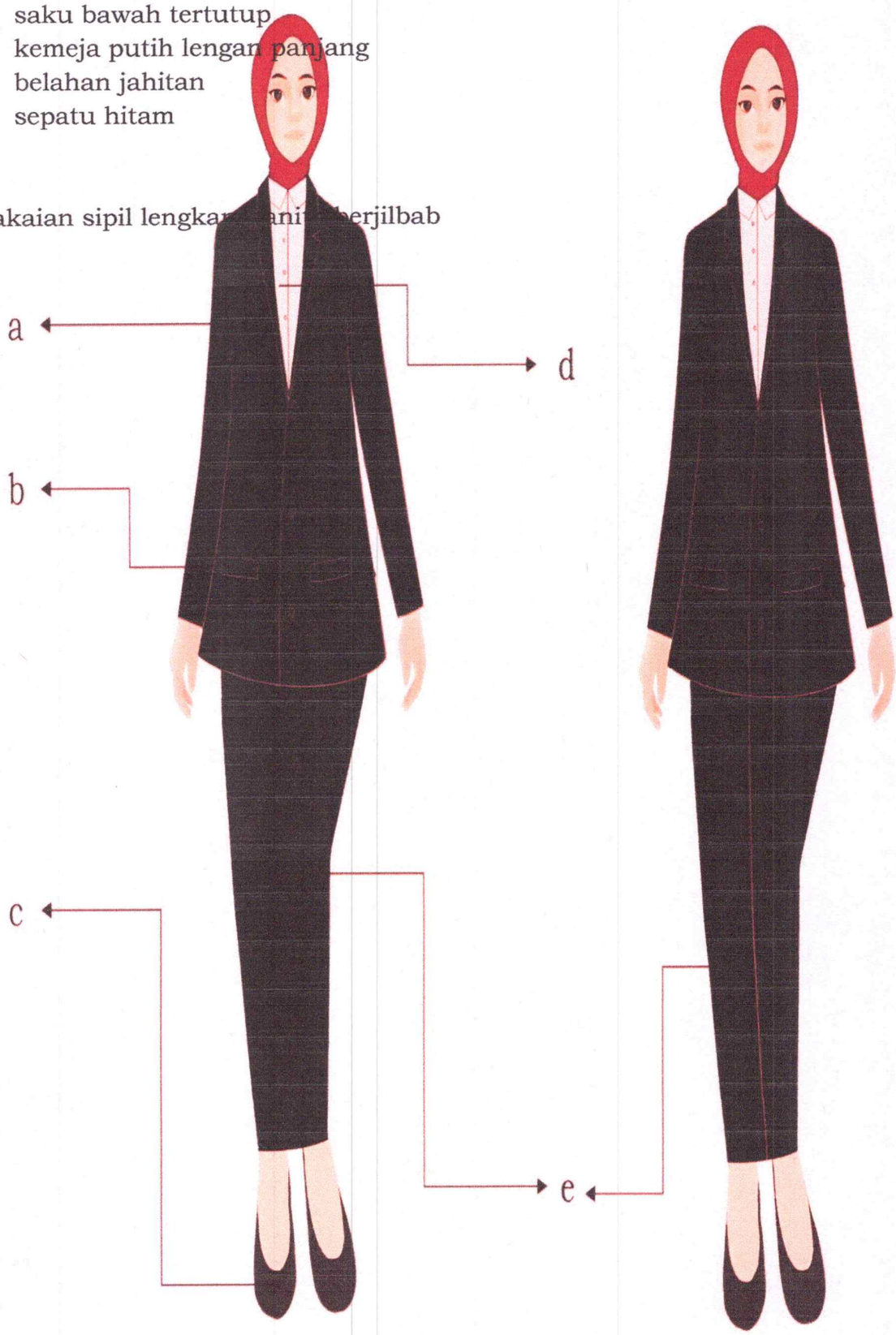


Keterangan :

n

a. Dasi
b. kancing 3 buah
c. saku bawah tertutup
d. kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan
f. sepatu hitam

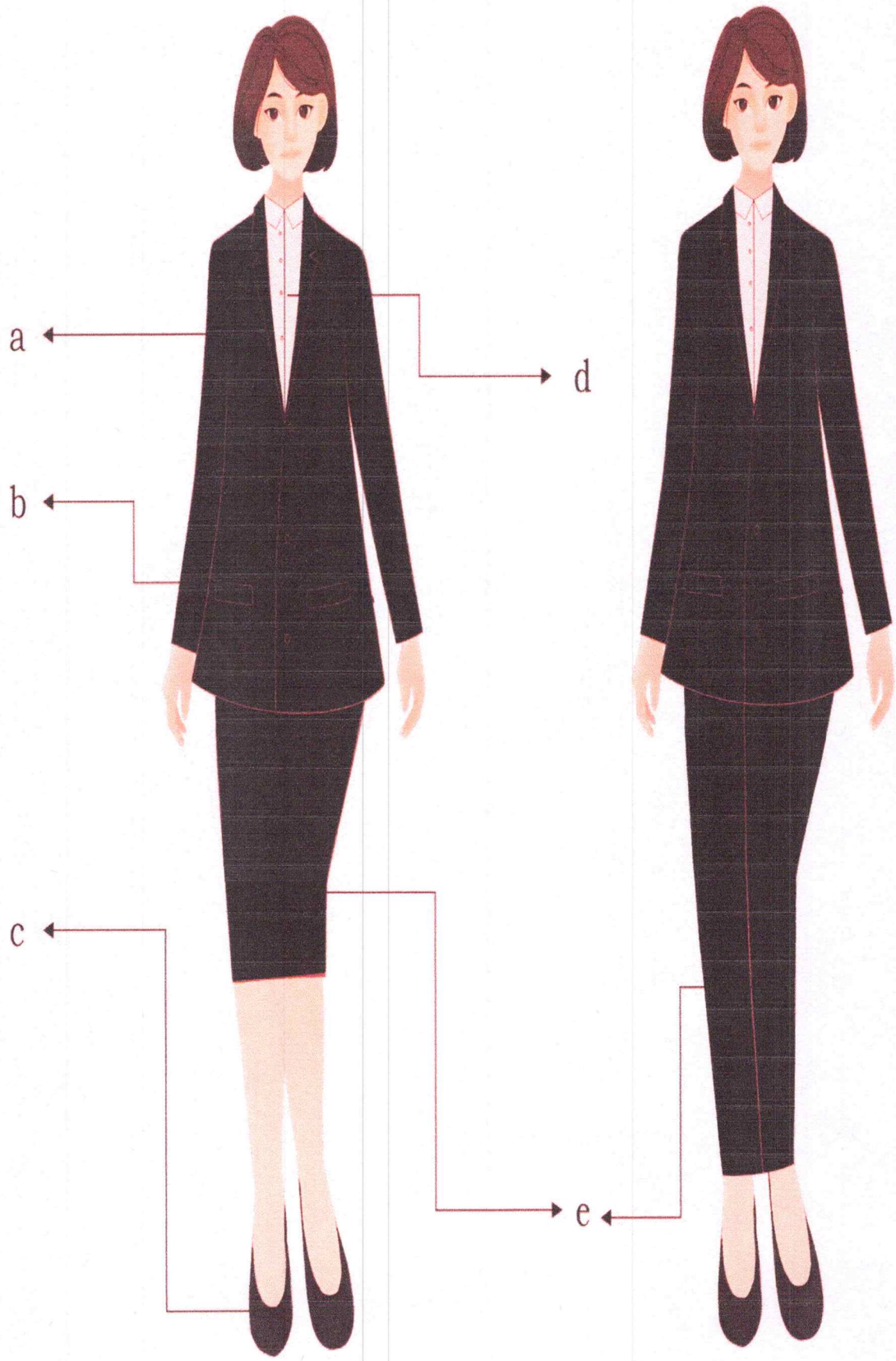
2. Pakaian sipil lengka[illegible]ani berjilbab



n

Keterangan :
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/ celana panjang hitam

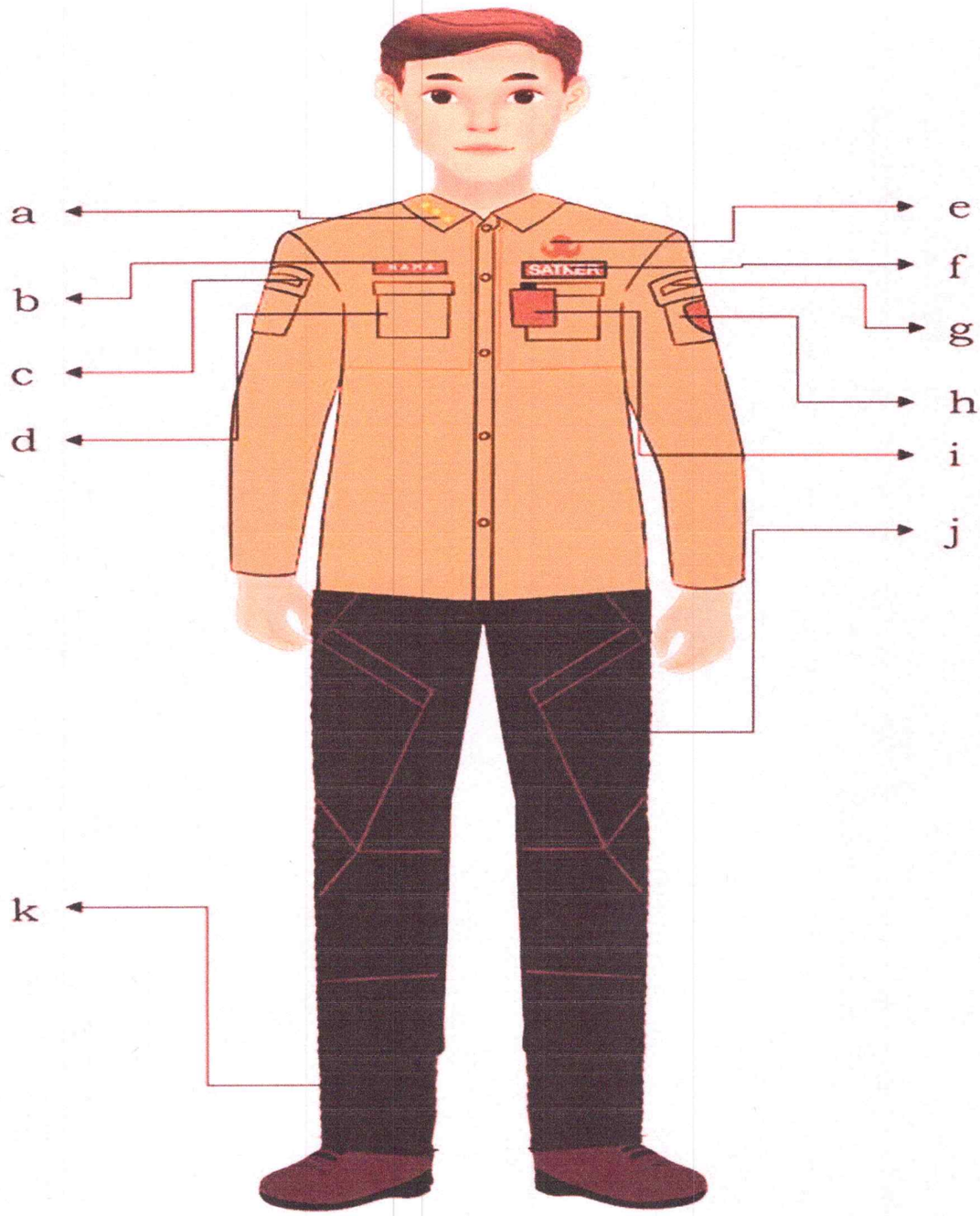
3. Pakaian sipil lengkap wanita



n

Keterangan :
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/ celana panjang hitam

D. Jenis dan model pakaian dinas lapangan
1. Pakaian dinas lapangan pria

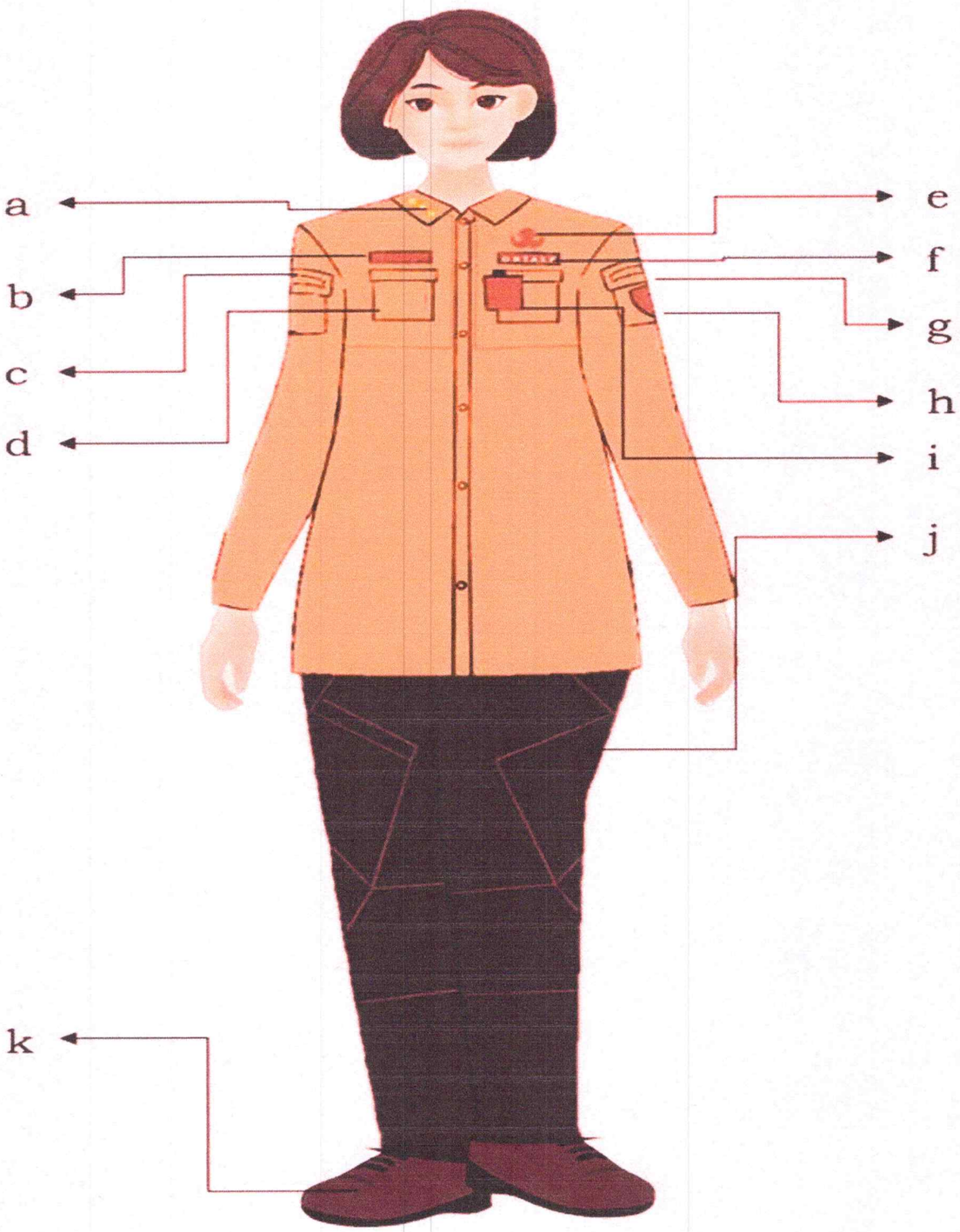


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

n

f. nama satuan/ unit kerja
g. nama Daerah
h. lambang Daerah
i. tanda pengenal
j. celana panjang
k. sepatu hitam

2. Pakaian dinas lapangan wanita

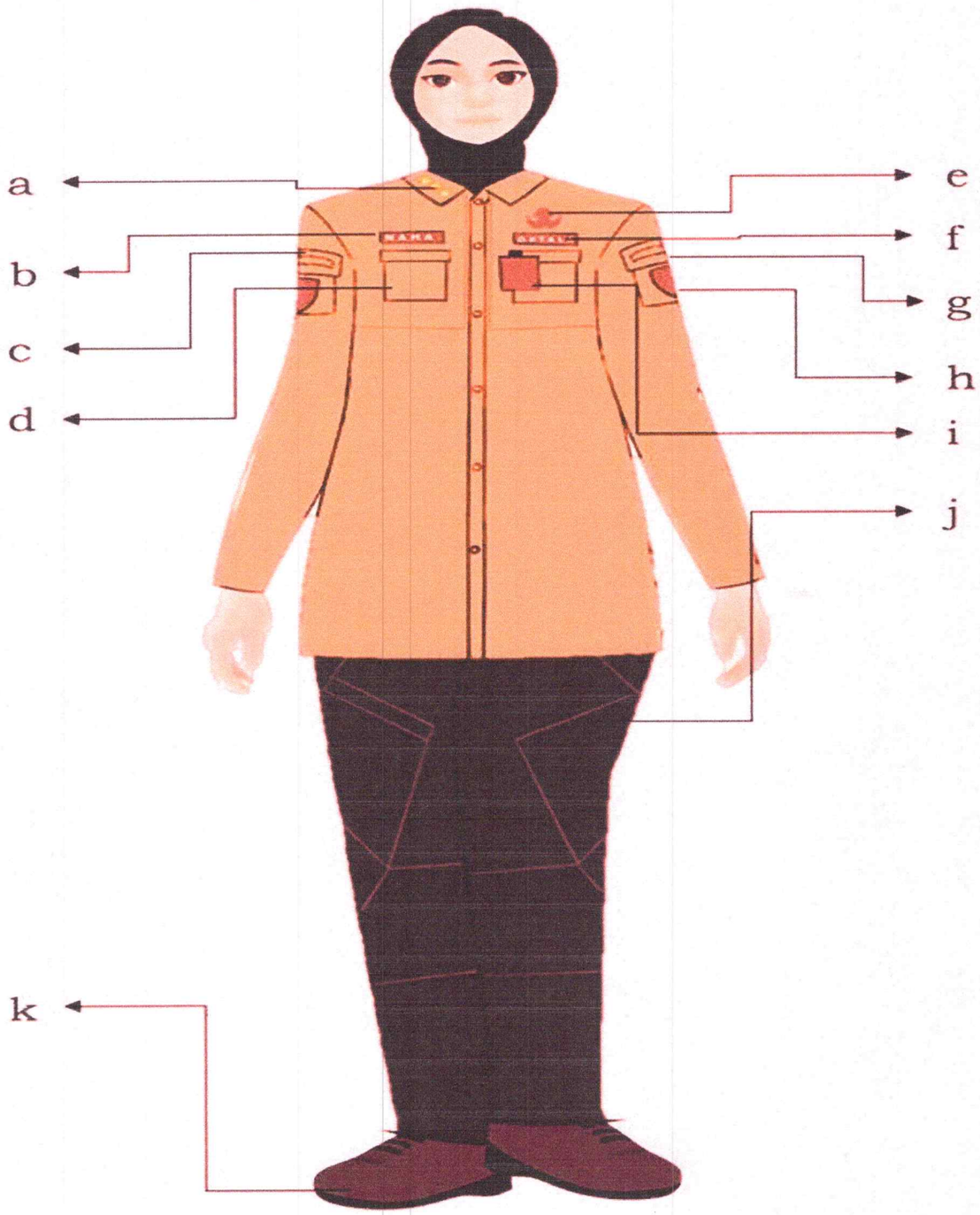


Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku

n

e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/ unit kerja
g. nama Daerah
h. lambang Daerah
i. tanda pengenal
j. celana panjang
k. sepatu hitam

3. Pakaian dinas lapangan wanita berjilbab



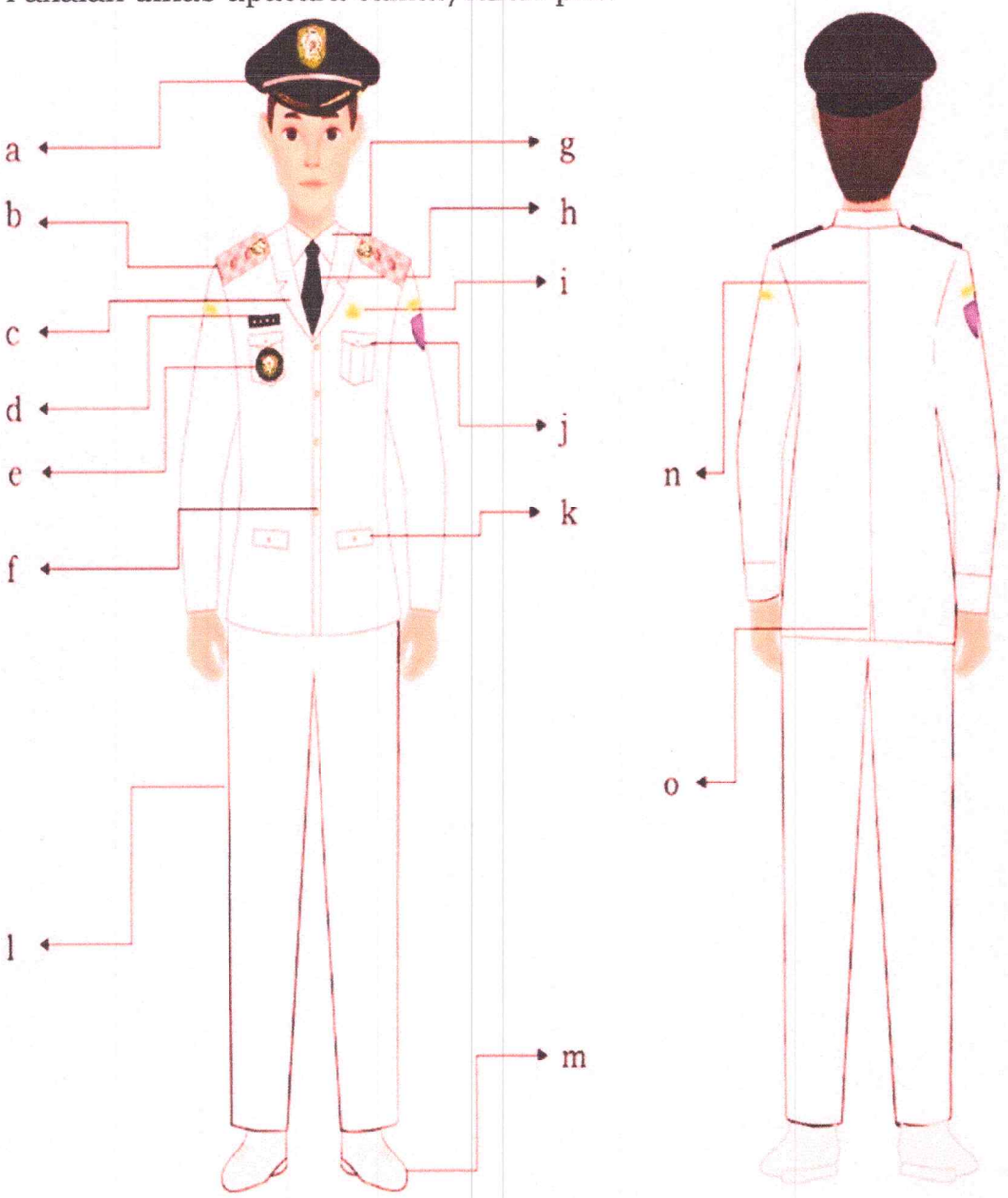
Keterangan :
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku

n

e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/ unit kerja
g. nama Daerah
h. lambang Daerah
i. tanda pengenal
j. celana panjang
k. sepatu hitam

E. Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas upacara camat dan lurah

1. Pakaian dinas upacara camat/lurah pria



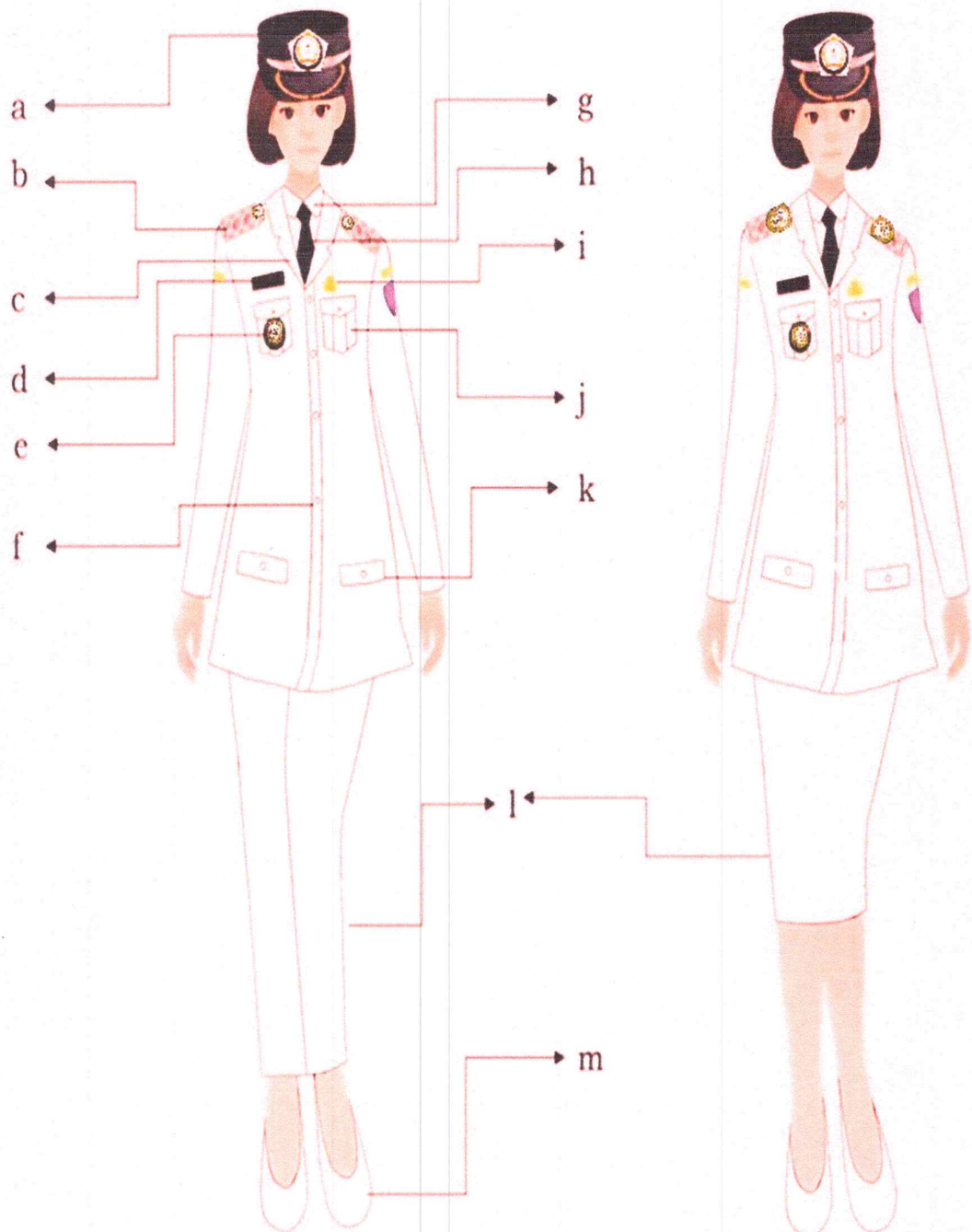
Keterangan:

a. Pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih

n

h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

2. Pakaian dinas upacara camat/lurah wanita

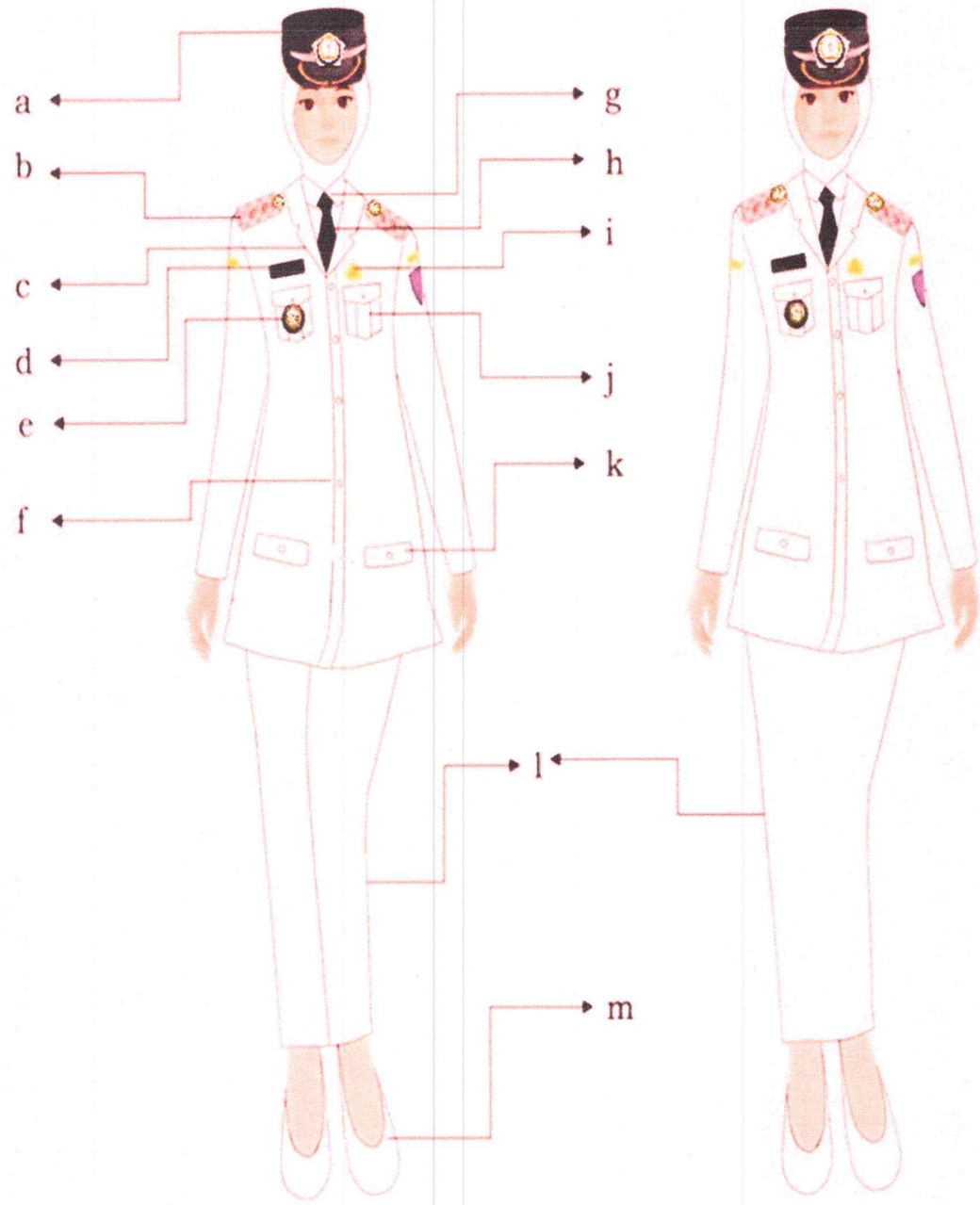


Keterangan :
a. Pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama

n

e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian dinas upacara camat/lurah wanita berjilbab



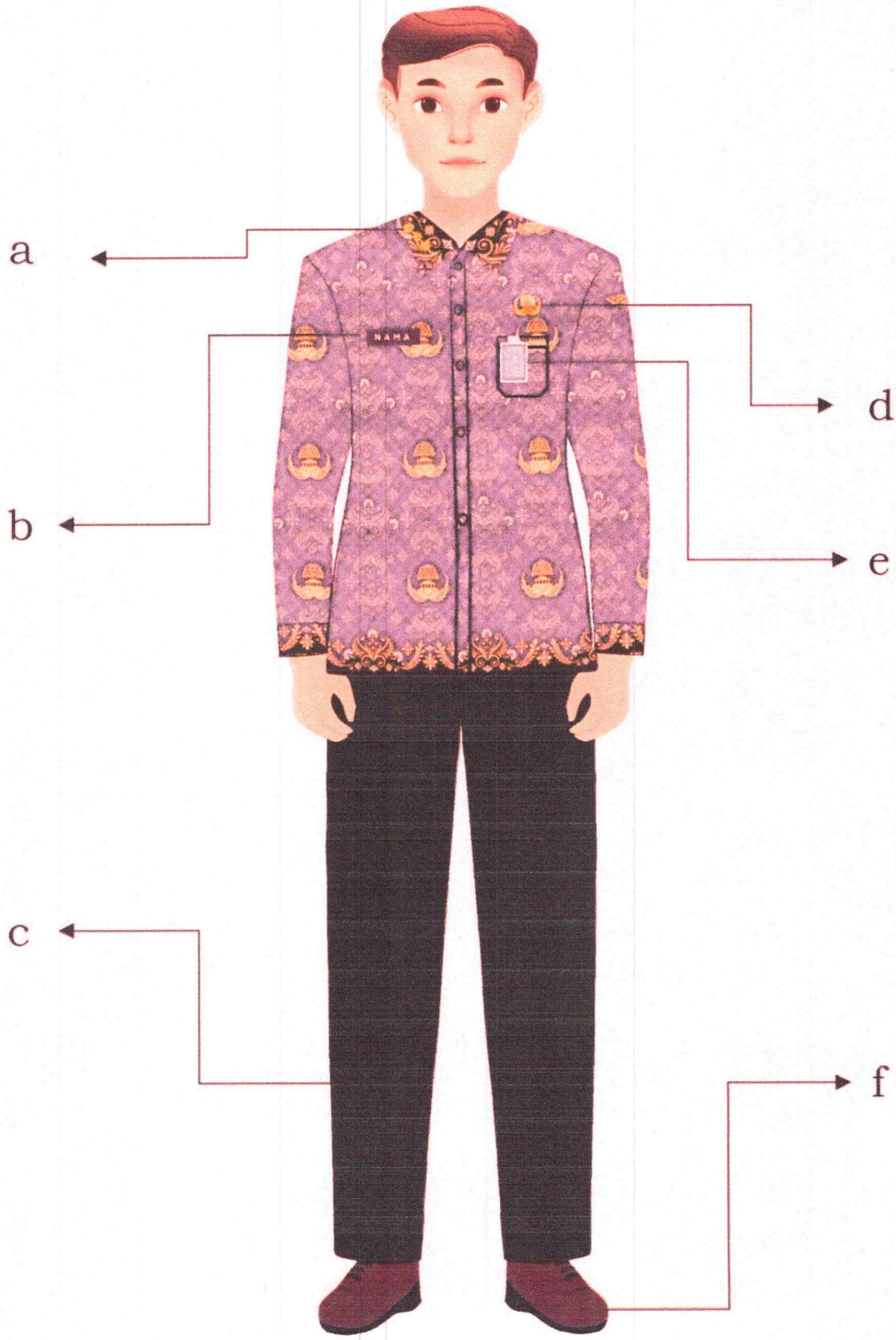
Keterangan :
a. Pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku

n

f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana/ rok putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian seragam batik KORPRI

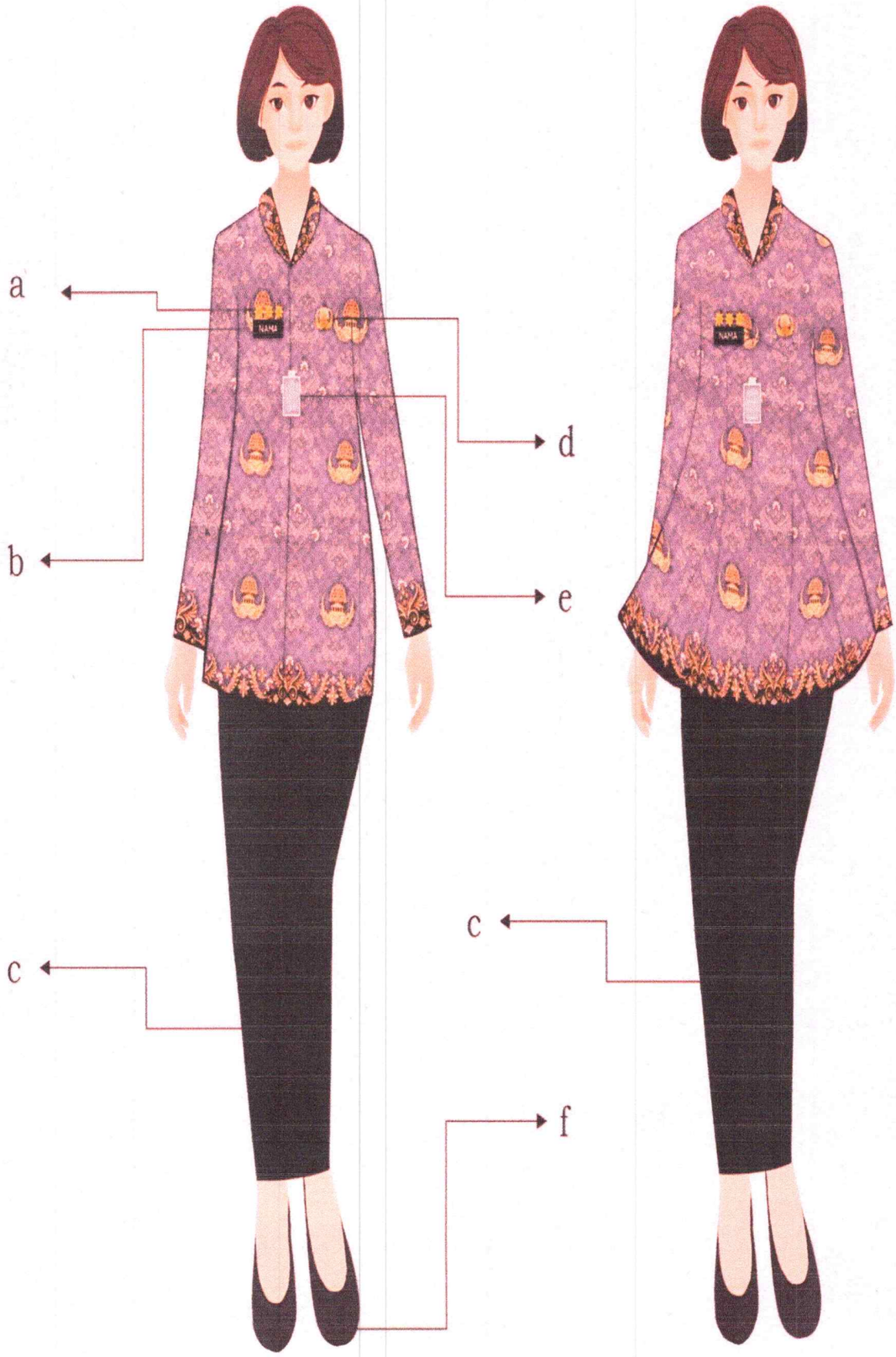
1. Pakaian seragam batik KORPRI pria



n

Keterangan :
a. tanda jabatan
b. papan nama
c. celana panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

2. Pakaian seragam batik KORPRI wanita

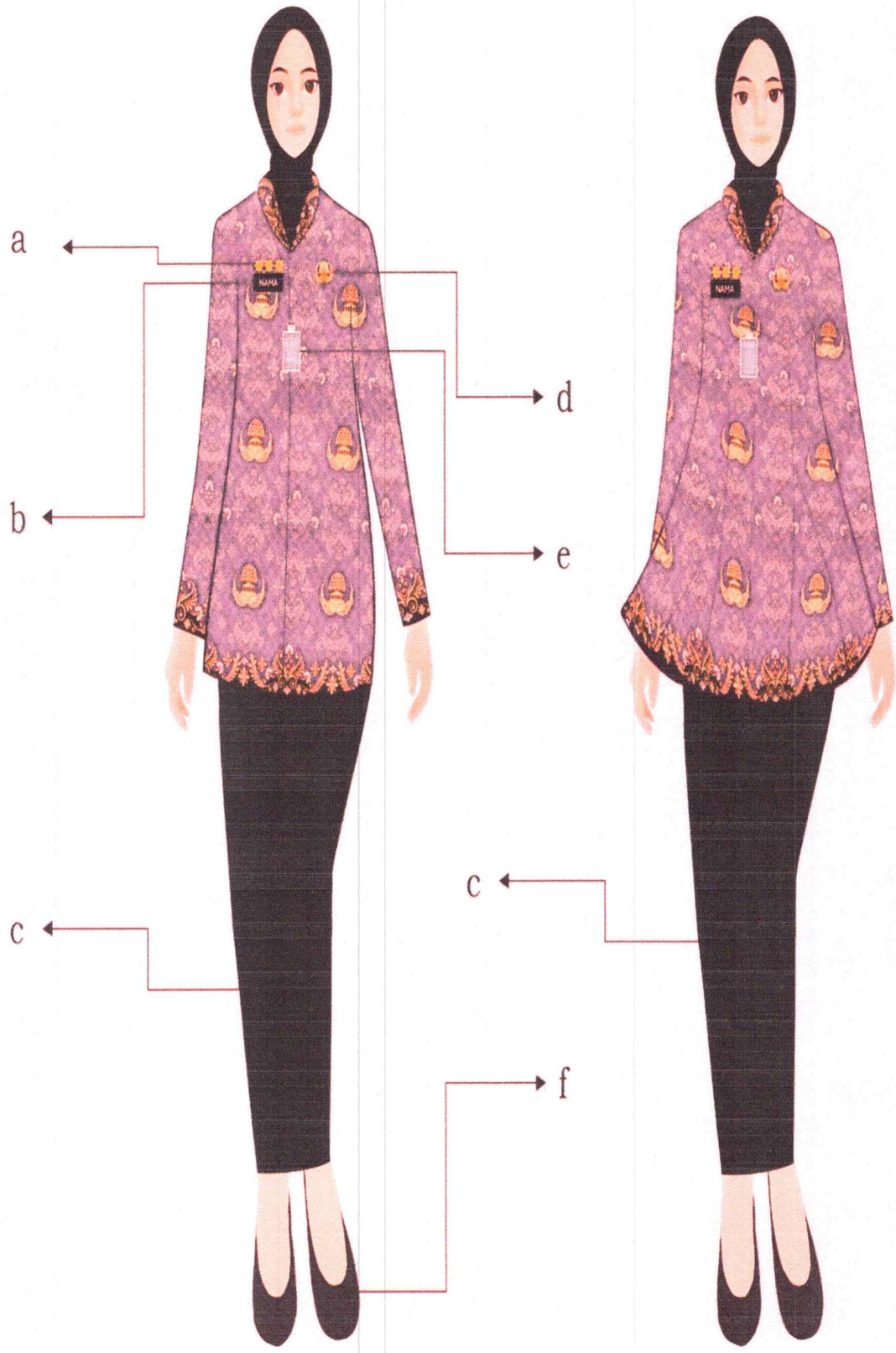


n

Keterangan:

a. tanda jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
b. papan nama
c. celana/ rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

3. Pakaian seragam batik KORPRI wanita berjilbab



Keterangan :

a. tanda jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
b. papan nama
c. celana/ rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

n

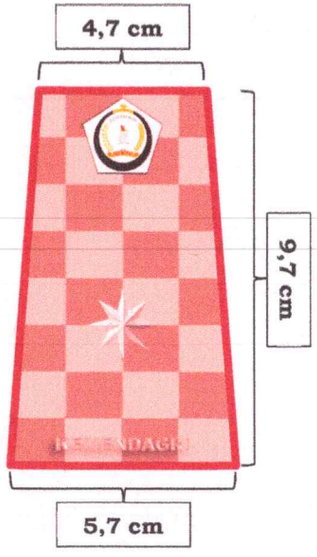
G. Bentuk tanda jabatan

1. Tanda jabatan

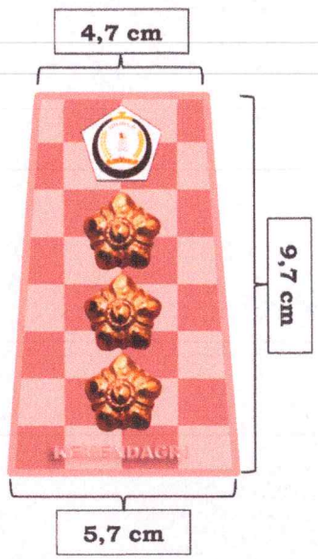
Tanda jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda jabatan tersebut bermakna: bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunya filosofi kepemimpinan kompleks dan indeal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.

melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunya filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.

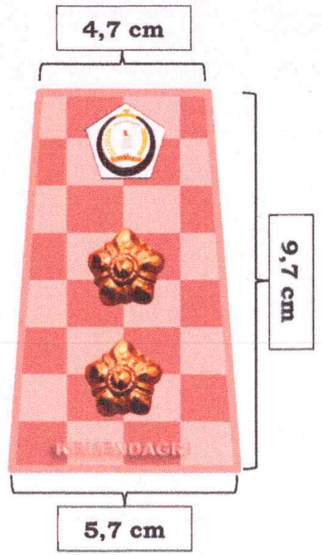
a. Tanda Jabatan Bahu

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan,Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian warna khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang Kabupaten Nias Selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

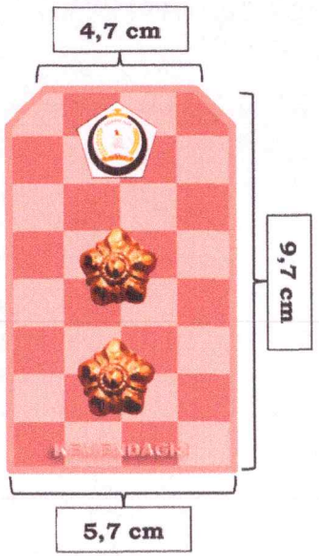
n

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian warna khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang Kabupaten Nias Selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian warna khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Kabupaten Nias Selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

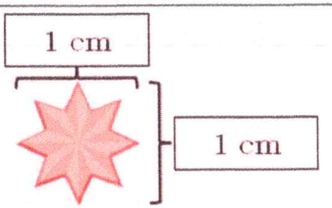
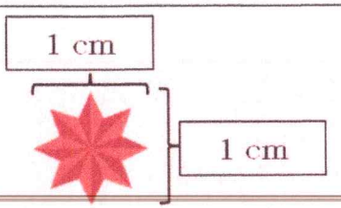
n

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian warna khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Kabupaten Nias Selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
		Camat	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat : a. Melaksanakan pelantikan; b. Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia; c. Hari jadi daerah; dan d. Hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Kabupaten Nias Selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

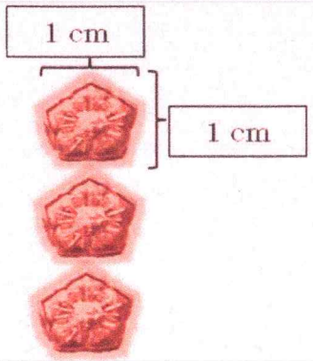
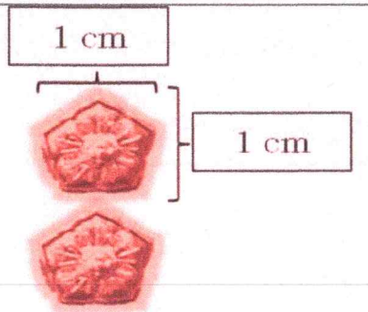
n

		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan : a. Melaksanakan pelantikan; b. Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia; c. Hari jadi daerah; dan d. Hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah Kabupaten Nias Selatan berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

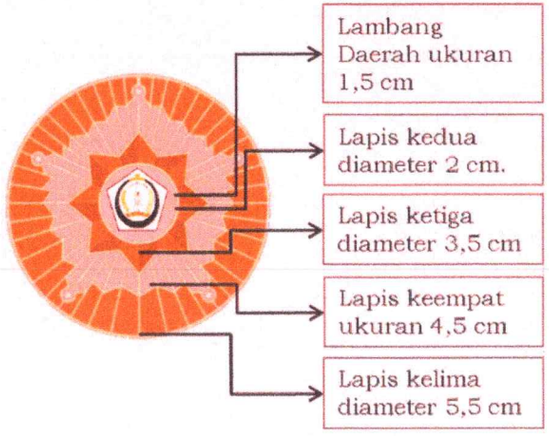
No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukura
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian warna khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan Pakaian Dinas Lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
2,		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian warna khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan Pakaian Dinas Lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

n

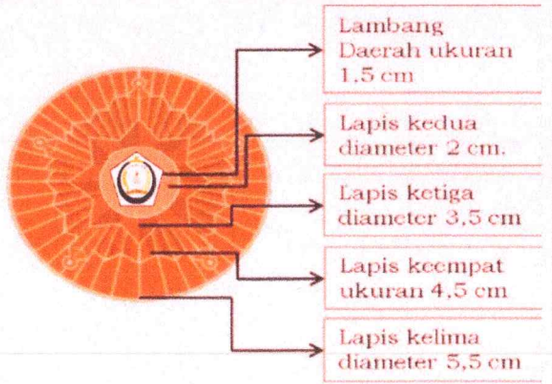
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian warna khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan Pakaian Dinas Lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian warna khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian khas daerah, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan Pakaian Dinas Lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

n

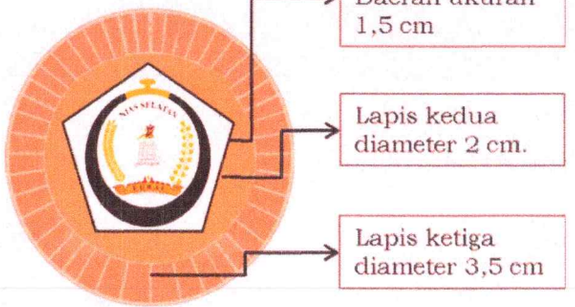
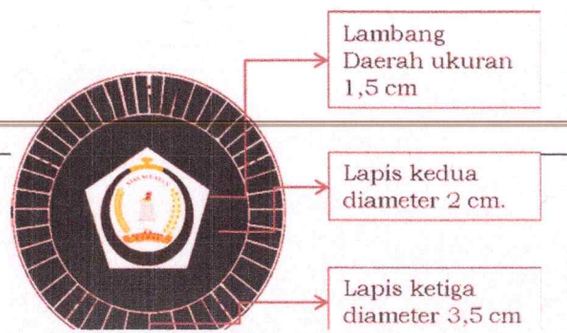
c. Tanda Jabatan Saku

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

n

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Nias Selatan - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perungg ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

n

3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian dinas harian warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota b. pakaian dinas upacara besar digunakan pada kegiatan: 1. melaksanakan pelantikan; 2. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. hari jadi daerah; dan 4. hari besar lainnya.	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Nias Selatan berwarna dengan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
4.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. pakaian dinas harian	- Bahan dasar logam - Lapis pertama berupa lambang pemerintah Kabupaten Nias Selatan

n

			warna khaki dan pakaian dinas harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota b. pakaian dinas upacara besar digunakan pada kegiatan: 1. melaksanakan pelantikan; 2. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. hari jadi daerah; dan 4. hari besar lainnya.	berwarna dengan ukuran 1,5 cm - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari- jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm

n

Contoh penggunaan tanda jabatan

1. Tanda jabatan kerah



n

2. Tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan nama



f. Nama kementerian dan nama pemerintah daerah





g. Lambang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan



Arti Logo:

1. KALABUBU adalah kalung yang biasa dipakai laki-laki pada upacara adat,merupakan lambang kemenangan, keheroikan dan kesatria. KALABUBU juga merupakan simbol mikro kosmos, kebulatan tekad dalam mempersatukan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tulisan NIAS SELATAN yang berada dilingkaran Kalabubu merupakan identitas sebagai Daerah Otonom yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. SUSUNAN BATU (Hombo Batu) berjumlah 28 (dua puluh delapan), melambangkan tanggal pengesahan Kabupaten Nias Selatan sebagai Daerah Otonom Baru diLingkungan wilayah Propinsi Sumatera Utara.
4. TINGKATAN BATU (Hombo Batu) berjumlah 7 (tujuh), melambangkan bulan (Juli) pengesahan Kabupaten Nias Selatan.
5. SEGITIGA BERANTAI diatas SIKHOLI NI'OWÖLIWÖLI berjumlah 20 (dua puluh) dan tanda bulatan (0) dalam segitiga dengan kerucut sebanyak 3 (tiga) melambangkan tahun pengesahan Kabupaten Nias Selatan (20-0-3).
6. KAPAS yang berjumlah 17 (tujuh belas) dengan kaitannya berbentuk ∞ dibawah SIKHOLI NI'OWÖLIWÖLI berjumlah 8 (delapan) dan PADI berjumlah 45 (empatpuluh lima) melambangkan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (17-08-45)
7. ORANG YANG SEDANG MELOMPAT BATU melambangkan Ketangkasan, Ketangguhan dan Patriotisme. Pelompat Batu juga merupakan simbol masyarakat Nias Selatan yang sedang berjuang untuk membuat lompatan-lompatan besar dalam mengejar ketertinggalannya sehingga dapat sejajar dengan daerah lain.

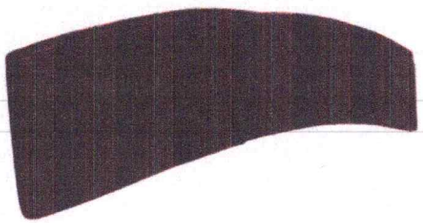
8. SIKHOLI NI'OWÖLIWÖLI dalam struktur bangunan tradisional Nias Selatan berfungsi sebagai dasar bangunan; NI'OWÖLIWÖLI pada SIKHÖLI bermakna keindahan.
9. Tulisan FURAI digali dari filsafat Budaya Nias Selatan dan merupakan motto abadi Nias Selatan. FURAI memiliki arti: Rorogö, Hofi, Amoniö, Fazawa, Tuwuni, dan Amölisi. FURAI juga bermakna ajakan untuk: Menjaga, Memelihara, dan Menjunjung Tinggi Nilai Martabat.
10. Bagian Luar Segi Lima melambangkan Bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

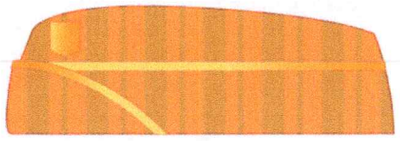
h. Tanda pengenal



H. Kelengkapan

1. Tutup kepala

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh Aparatur Sipil Negara	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik KORPRI; dan b. Pada saat menggunakan PSL.	bahan dasar kain

2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh Aparatur Sipil Negara	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH warna khaki.	- Bahan dasar kain warna khaki - Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 CM - Lambang Kabupaten Nias Selatan (Furai) berbahan dasar logam, berwarna, berukuran 1,5 CM, dikenakan pada ujung atas mutz
3.	Pet upacara besar Camat 	Camat	Pada saat menggunakan PDU	- Bahan dasar kain warna hitam - Lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam - Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir - Pita emas dengan lebar 1,75 CM
4.	Pet upacara besar Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan PDU	- Bahan dasar kain warna hitam - Lambang daerah berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam - Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir - Pita perak dengan lebar 1,75 CM

2. Ikat pinggang



Digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dengan lambang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

3. Sepatu

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.	  	Dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers sepatu harus berwarna hitam dan/ atau dominan hitam

2.		Dikenakan pada saat menggunakan PSL	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		Dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. Jilbab

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH warna khaki	kuning mustard
2.	PDH kemeja putih	khaki muda
3.	PDH batik atau pakaian khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian seragam Batik KORPRI	hitam
7.	PDU	putih

5. Spesifikasi kain

a. Kain Pakaian Dinas Harian warna khaki

No.	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5%
	- Lusi II	25,1	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5%
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		

			-	Poliester	3-4	Minimum
			-	Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan					
	- Kering				4	Minimum
	- Basah				3-4	Minimum
	c. Keringat					
	c.1 Sifat asam					
	- Perubahan warna				4	Minimum
	- Penodaan warna pada :					
	- Poliester				3-4	Minimum
	- Kapas				3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa					
	- Perubahan warna				4	Minimum
	- Penodaan warna pada :					
	- Poliester				3-4	Minimum
	- Kapas				3-4	Minimum
	d. sinar Terang Hari				4	Minimum
5.	Warna				Khaki	
	- L*				54,78	
	- a*				7,01	AE* ≤ 0,8
	- b*				26,43	

b. Kain Pakaian Dinas Harian kemeja putih

No.	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

c. Kain Pakaian Dinas Lapangan warna khaki

No.	Jenis Uji	Persyaratan yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5%

	- Lusi II	23,7	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5%
	- Pakan II	22,7	± 5%
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		

	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	AE* ≤ 0,8
	- b*	17,16	

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA